

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN  
WARGA (PMB-RW) DI KECAMATAN TENAYAN RAYA  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2018**

**Oleh :**

**Fikri Haikal**

**Email:**

**Pembimbing: Dr. Ali Yusri, MS**

**Jurusan ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**Abstrak**

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan segala upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan termasuk salah satu kota yang menciptakan inovasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan salah satu kebijakan unggulan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pelaksanaan program PMB RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018, (2) Untuk mengetahui menghambat pelaksanaan program PMB RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAPPEDA Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tenayan Raya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif. Hasil penelitian disimpulkan 1) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Pemberdayaa Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Dalam menaggulangi kemiskinan Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sudah baik namun belum optimal. 2) Keterbatasan dana belum merata dalam mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi melalui sistem koperasi dan pengembangan SDM

***Kata Kunci: Pelaksanaan Program, PMBRW***

**COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM BASED ON CITIZENS  
ASSOCIATION (PMB-RW) IN TENAYAN RAYA SUB-DISTRICT  
OF PEKANBARU DISTRICT 2017-2018**

**By :**

**Fikri Haikal**

**Email:**

**Advisor : Dr. Ali Yusri, MS**

**Department of Governmental science  
faculty of Social Science and Political Science  
Riau University**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

This study analyzed the level of academic integrity of class XI MA Muhammadiyah Pekanbaru. The formulation of the problem is how to describe the academic integrity of class XI MA Muhammadiyah Pekanbaru students? Thus this study aims to determine the description of the academic integrity of XI class MA Muhammadiyah Pekanbaru. The research design was descriptive. This type of research is qualitative. The research sample was determined as many as 20 students and 6 teachers MA Muhammadiyah Pekanbaru. The data were obtained by collecting interview and documentation techniques. The results of the analysis show that overall, academic integrity in class XI MA Muhammadiyah Pekanbaru is categorized as good. Where it can be seen from the results of the research that the integrity of the value of mutual trust in class XI MA Muhammadiyah Pekanbaru can be categorized as good, besides that the value of honesty, mutual respect and responsibility value in class XI MA Muhammadiyah Pekanbaru can be categorized as quite good, then regarding the value integrity justice where students have received justice well accompanied by appreciation for the assessment is important for the formation of trust between teachers and students so that it can make students highly valued.

***Keywords: Program Implementation, PMBRW***

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan segala upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan termasuk salah satu kota yang menciptakan inovasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan salah satu

kebijakan unggulan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) memiliki tujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas

kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Terjadi peningkatan jumlah RW yang mengikuti program PMB RW Kota Pekanbaru dan tingkat partisipasi RW meningkat drastis di Kecamatan Tenayan Raya. Namun jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya menurun secara signifikan pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 bantuan program PMB RW hanya program nonfisik dengan bentuk kegiatan pelatihan sedangkan bantuan fisik tidak dilaksanakan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat

Masyarakat melalui rapat musyawarah RW akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) tidak hanya untuk pembenahan lingkungan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk pelatihan

keterampilan. Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) sebanyak 128 orang yang diambil dari kalangan sarjana. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Mengingat latar belakang pendidikan ketua rukun warga di Pekanbaru sangat beragam, maka perlu pendamping untuk mengarahkan ketua rukun warga penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun untuk kepentingan masyarakat.

Sarjana pendamping memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengarahan serta pengawasan terhadap jalannya PMB-RW di lokasi tugasnya. Pembinaan RW dalam satu kelurahan dibina oleh sarjana pendamping yang dipilih oleh tim kordinator tingkat Kota. Pengawasan program ini langsung di bawah Walikota Pekanbaru melalui BAPPEDA. Tim Kordinator tingkat Kota dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan dengan menelaah dokumen laporan yang dibuat oleh sarjana pendamping sebulan sekali dan setahun sekali. Berdasarkan laporan ini dapat diawasi bagaimana pelaksanaan PMB-RW di suatu kelurahan.

Pelaksanaan PMB-RW di Tenayan Raya menurun sangat signifikan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu berkurang dari 62 pelatihan pada 2016 menjadi 4 pelatihan pada 2017 dan 2018. Kecamatan Tenayan Raya merupakan percontohan program PMRW namun ternyata pada kecamatan percontohan saja ada beberapa masalah terkait pelaksanaan PMBRW maka penulis tertarik untuk meneliti Kecamatan Tenayan Raya yang awalnya adalah percontohan (Role model) PMBRW. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat

disimpulkan dengan meneliti Kecamatan Tenayan Raya yang merupakan kecamatan percontohan saja sudah cukup mencerminkan bagaimana pelaksanaan PMBRW secara umum di Kota Pekanbaru.

Terdapat 2 RW di Kelurahan Pematang Kapau yang menolak bantuan PMB RW dikarenakan kapasitas kuota PMB RW terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan permintaan sebelumnya sehingga beberapa RW merasa bantuan tersebut dapat memancing timbulnya iri hati masyarakat yang tidak diberikan kesempatan mengikuti pelatihan. penolakan yang terjadi karena memang masyarakat tidak memahami tujuan Program PMB RW dengan baik akibat dari sosialisasi yang dilakukan kurang baik.

Program PMB RW dibagi menjadi 2 macam yaitu fisik dan Non Fisik. Fisik yaitu berupa bantuan untuk pembangunan seperti turap, pos kampling, gapura dll. Sedangkan Non Fisik yaitu pelatihan dan pembinaan seperti pelatihan ternak kambing, pelatihan bengkel dll. Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, setelah ditelaah dengan baik, hanya 3.5% masyarakat peserta Pelatihan PMB RW yang dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Berdasarkan data dari total 476 orang yang mengikuti pelatihan di Kecamatan Tenayan Raya, hanya 17 orang yang dapat membuka usaha yang sesuai dengan pelatihan tersebut. Minimnya usaha yang dapat dibuka oleh peserta PMB-RW diduga disebabkan oleh context pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan isi (content) dari pelatihan tersebut belum mumpuni dan belum lengkap sehingga tidak dapat menghasilkan peserta yang berkompeten dibidangnya sehingga pelatihan PMBRW tidak dapat mencapai tujuannya yaitu mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, membuat penulis tertarik meneliti bagaimana evaluasi efektifitas pelaksanaan program tersebut dengan topik yaitu Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang diperlukan untuk menyampaikan masalah-masalah berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2017-2018. Penelitian ini dirumuskan pada tahun 2019 sehingga peneliti memilih tahun penelitian 2017-2018 karena laporan pelaksanaan yang sudah diterbitkan adalah tahun 2017-2018 sedangkan laporan tahun 2019 tidak ada maka peneliti pelaksanaan Program PMBRW di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2017-2018.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam melaksanakan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 ?
2. Apa saja penghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

2. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018.

## KAJIAN TEORI

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2007) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan dan program-program. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (Grindle, 1980).

Content of Policy (Isi Kebijakan) yaitu berisi :

1. *Interst Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi). Indikator ini beranggungan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
2. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat). Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai). Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi

kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan). Dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.
5. *Program Implementasi* (Pelaksanaan Program). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapat dengan baik pada bagian ini.
6. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan). Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

*Context of Policy* (Lingkungan Kebijakan) yaitu berisi :

1. *Power, interest and strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor yang Terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak

diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

2. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa). Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menggapai suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiono, 2009). Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru dengan lokasi penelitian pada sekretariat Tim Kordinator tingkat Kota di BAPPEDA Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tenayan Raya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sumber

data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan tertentu (Moleong, 2014). Penelitian ini menggunakan 4 informan yaitu Sekretaris Tim Kordinator PMB-RW Kota Pekanbaru, KORWIL Wilayah 2 PMBRW, Camat Kecamatan Tenayan Raya, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya, dan 3 Ketua RW di Kelurahan Pematang Kapau. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif (Miles & Huberman, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Program PMB-RW ini di terbitkan pada tanggal 12 mei 2014 dengan perwako sebagai landasan badan hukumnya. Program ini di susun mejadi tiga bagian yang di kenal dengan tri daya yang di atur dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2016. Teori mplementasi akan digunakan untuk membahasal hasil penelitian ini.

***Content of Policy (Isi Kebijakan)***  
yaitu berisi :

#### **1. Tujuan Program PMB-RW**

Pelaksanaan program PMB-RW yang tujuannya Rukun Warga (RW) harus memiliki peran penting dalam pembangunan, tidak hanya menerima dan menjalankan keputusan. Tentu belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai

tugas, tanggung jawab aktor pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan program PMB-RW supaya target yang di diharapkan dapat tercapai tidak hanya sebatas angan-angan, akan tetapi implementasi harus di tekankan sehingga kebijakan pemerintah tersebut mampu di pertanggung jawabkan dan keberhasilan program yang harus di utamakan.

Tujuan terbentuknya PMB-RW ini menurut sekretaris tim kordinator PMB-RW Kota Pekanbaru adalah untuk mengurangi kemiskinan Kota Pekanbaru pada ekonomi masyarakat. Secara sederhana pelaksanaan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sisial dan memperluas keempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan kapasitas pada tingkat kota.

#### **2. Target Program PMB-RW**

Program ini di buat di tujukan langsung kepada masyarakat yang memerlukan dengan program yang di rancang untuk mengatasi maslah sesuai dengan kebutuhan. Mengenai target dalam pencapaian program, menurut Sekretaris Tim Kordinator PMB-RW Kota pekanbaru target yang ingin di wujudkan dalam pelaksanaan program PMB RW adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi. Kemudian target yang ingin di wujudkan dalam pelaksanaan program PMB RW adalah alumni pelatihan di buat kelompok usaha. Selain itu sasaran program ini pelaksanaan program ini adalah masyarakat, agar masyarakat bisa meningkatkan tarif ekonominya sendiri.

Dapat di simpulkan bahwa target dalam program PMB RW ini adalah masyarakat, karena pelatihan sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk melakukan usaha. Dan program PMB RW ini bertujuan untuk menyejahterakan

masyarakat melalui program usaha. Dan program PMB RW ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan warga agar tidak bergantung kepada orang lain karena bisa menghasilkan usaha sendiri setelah mengikuti pelatihan.

### 3. Langkah-langkah mekanisme alur bantuan PMB-RW

Meknisme penyelenggaraan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Di kota pekanbaru, PMB-RW sendiri sudah mulai di laksanakan secara bertahap oleh pemko Pekanbaru di 93 RW di kecamatan Tenayan Raya sebagai RW percontohan. Puluhan RW di kawasan Tenayan Raya telah menerima dana PMB-RW.

Langkah langkah mekanisme alur bantuan PMB-RW di mulai dari pembentukan organisasi lembaga keswadayaan masyarakat, lembaga keswadayaan masyarakat mempunyai peran sebagai berikut: 1). Memfasilitasi perencanaan pasrtisipatif melalui tahapan dan siklus PMB-RW. 2). Melakukan musyawarah untuk membuat Peta Rona Rukun Warga .3). Melakukan validasi data penduduk dan mengelompokkan masing masing data penduduk,4) melakukan musyawarah untuk merumuskan Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. 5), melakukan musyawarah untuk menyusun rencana pembangunan kelurahan 6) ketua LKM-RW menetapkan tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan konstruktif yang di swakelola. 7).tim yang di maksud di poin f di tetapkan berasal dari warga di lingkungan RW dan berdasarkan hasil

musyawarah. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa tim kordinator tingkat kota telah melakukan sosialisasi kepada RW se-Kecamatan Tenayan Raya.

### 4. Akuntabilitas dan tranparansi program

Menurut perda no 5 tahun 2016. Di dalam RK PW terdapat rencana rencana pemberdayaan yang di usulkan masyarakat, pembuatan RK PW di lakukan oleh ketua ketua RT setempat dan di dampingi oleh lurah. Sejak PMB RW di rintis, belum tampak output dari PMB RW ini di hasilkan oleh tim organisasi maupun tim fasilitator di tingkat kota. Tim koordinasi melalui Bapeda Kota Pekanbaru fokus untuk dapat memaksimalkan pencapaian dan penyelesaian RK PW. selama ini pelaksana pemberdayaan rukun warga RKP RW melalui musyawarat di dampingi oleh pendamping program PMB RW telah berjalan dengan baik. Dan menurut pengamatan penulis di simpulkan bahwa secara umum perencanaan program pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tenayan Raya cukup baik. Pendanaan PMB-RW yang dilaksanakan di KEcamatan Tenayan Raya hanya bersumber pada APBD Kota Pekanbaru saja sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara merata dan terlasa secara terbatas pada krw atau kelurahan tertentu.

### 5. Anggaran Pelaksanaan program

Di Kota Pekanbaru, PMB-RW sudah mulai di laksanakan secara bertahap oleh Pemko Pekanbaru di 93 RW di Kecamatan Tenayan Raya sebagai RW percontohan. Dalam melaksanakan program PMB-RW ini membutuhkan anggaran pelaksanaan. Menurut sekretaris BAPEDA kota Pekanbaru anggaran yang di butukan sebanyak 25 juta. Menurut Korwil 2 dan Sekretaris Tim PMB-RW Kota Pekanbaru idealnya dana yang di perlukann untuk melaksanakan program PMB-RW saat ini

sangat kurang. anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu 25 juta perRW namun tidak semua RW dan Kelurahan yang dipilih untuk mengadakan PMB-RW. Karena dana yang dicairkan terbatas.

#### 6. Pengawasan Program

Pengawasan pelaksanaan program PMB-RW tidak lepas dari adanya tim pelaksana program. Pelaksanaan program PMB-RW ini di bawah Bappeda Pekanbaru. Pengawasan program yang di ajukan masyarakat melalui RW masing-masing untuk membuat suatu kegiatan yang berguna bagi masyarakat di daerahnya. Dan disini masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan terhadap program PMB-RW ini, karena apa yang program ini juga untuk masyarakat. Selain itu stake holder yang bertanggung jawab dalam program PMB-RW ini adalah Walikota. pengawasan program ini sudah dilakukan oleh Tim kordinator PMB-RW di tiap jenjang dan ditambah lagi pengawasan dan bimbingan yang ditugaskan kepada sarjana pendamping.

#### 7. Keadilan dan kesesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan program

Keadilan dan kesesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan program PMB-RW mengandung arti bahwa program ini merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesia. Menurut Sekretaris Tim Kordinator PMB-RW hal yang harus di penuhi untuk mengikuti program PMB-RW adalah masyarakat yang kurang mampu. respon masyarakat sudah baik dan Tim Kordinator PMB-RW sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan PMB-RW secara merata di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun

memang pada faktanya masih ada masyarakat yang menolak program tersebut dengan berbagai alasan.

#### **Content of Policy (Isi Kebijakan)** yaitu berisi :

##### 1. Pelaksanaan program sesuai prosedur

Dalam pelaksanaan program PMB-RW, memiliki prosedur yang di tetapkan oleh regulasi. pelaksanaan PMB-RW sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu kendala yang dihadapi oleh Tim PMB-RW adalah Lurah, Camat dan stake holder yang lain sibuk sehingga sulit melakukan kordinasi dan tingkat kesadaran msyarakat serta minat msyarakat yang kurang dalam mengikuti kegiatan pelatihan PMB-RW.

##### 2. Respon terhadap kritikan masyarakat

Dalam melaksanakan program PMB-RW tentunya ada ada respon yang di berikan dari masyarakat. Seperti yang di katakan oleh Sekretaris Tim Kordinator PMB-RW Kota PEkanbrau bahwa adanya pihak pelaksana yang memberi ruang untuk menampung masukan atau respon dari masyarakat. respon masyarakat sudah baik dan kritik masyarakat direspon dengan baik oleh tim kordintor PMB-RW di tingkat manapun. Hal ini di dukung oleh fasilitas yang layak untuk memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan PMB-RW seperti website resmi dan kotak saran yang ada di kantor PMB-RW.

##### 3. Evaluasi terhadap program

Evalusi selalu di adakan setelah habisnya setiap program, sama halnya dengan program PMB-RW ini adanya evaluasi dari tim penyelenggara. adanya

evaluasi setelah di laksanakan program ini, dalam Program ini pemerintah yang bertanggung jawab selaku penyelenggara dalam PMB-RW. Dan mengenai apa saja yang di evaluasi bagian apa saja yang telah di lakukan. Selanjutnya mengenai tujuan di laksanakan evaluasi ini adalah untuk melakukan pembaharuan dalam program selain itu tujuannya di laksanakan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari pelatihan.

Evaluasi yang dilakukan dalam menilai pelaksanaan PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya melalui dokumen secara tidak langsung dan secara langsung dating kelokasi pelatihan selama dilaksanakannya PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya. Selain itu tindakan evaluasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan serta menyesuaikan dengan permintaan dan kondisi/potensi dari masyarakat.

#### 4. Pemberian sanksi kepada pelaksanaan program

Pemberian sanksi kepada pelaksana program sangat penting tentunya, dengan adanya pengawasan program agar program PMB-RW berjalan dengan lancar, dan pengawasan ini langsung di turunkan dari pemerintah, menurut KASI PPN Kecamatan beliau mengatakan hal yang berbeda bahwa tidak adanya sanksi dalam pelaksanaan program. sanksi yang diberikan kepada sarjana pendamping hanya teguran secara persuasive tanpa ada tindakan represif seperti pemecatan, denda dll.

### **Penghambat (Hambatan) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018**

Kecamatan Tenayan Raya merupakan percontohan program PMB RW namun ternyata pada kecamatan percontohan saja ada beberapa masalah terkait pelaksanaan

PMBRW. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan dengan meneliti Kecamatan Tenayan Raya yang merupakan kecamatan percontohan saja sudah cukup mencerminkan bagaimana pelaksanaan PMBRW secara umum di Kota Pekanbaru.

Menurut Sujianto (2008) program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus di manfaatkan dan elemen-elemen lain yang di perlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu. menurut Charles (2009) suatu program adalah cara yang di laksanakan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tindak seperti, program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program, program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga di identifikasi melalui anggaran, program memiliki identitas yang bila berjalan secara efektif dapat di akui oleh publik.

Teori di atas berkaitan dengan hasil penelitian yang akan di bahas sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PMB-RW ini yang pertama sangat di butuhkan dana, namun sangat minimnya dana yang di realisasikan pemerintah kota sehingga program berjalan tidak merata. Dalam PMB-RW memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik. Selanjutnya faktor pendukung dalam pelaksanaan PMB-RW ini adalah tenaga pendamping, sangat mempengaruhi keberhasilan program PMB-RW. Tenaga pendamping yang di pilih dari kalangan sarjana akan membuat

program yang di lakukan menjadi program yang berkualitas.

Faktor pendukung lainnya yaitu gagasan atau rancangan yang tersusun di pikiran. Pada faktor ini yaitu membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh masyarakat dan lain lainnya. Faktor ppendukung selanjutnya yaitu keadilan, pada faktor ini sangatlah penting. Karena sebaiknya dalam program PMB-RW di kecamatan Tenayan Raya berjalan lancar

## 2. Faktor Penghambat

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian penulis tentang pengalihan kewenangan urusan

Setiap pelaksanaan suatu program pasti ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penghambat pelaksanaan program PMB RW. Penghambat yang ditemukan yaitu banyaknya warga perantau yang memiliki ekonomi yang kurang baik sehingga peserta PMB-RW yang banyak adalah perantau bukan warga asli dari Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian masyarakat yang dulit diajak berpartisipasi dalam program PMB-RW. Faktor penghambat selanjutnya dari pemberdayaan Ekonomi adalah kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengikuti kegiatan PMB RW ini. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara umum yang menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tenayan Raya diantaranya.

- a. Pendamping yang kurang sehingga menyebabkan terjadinya stagnan dalam implementasi Program sehingga terjadi ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan, ada beberapa pendamping yang ditugaskan

untuk menjadi fasilitator program yang tergabung dalam Lembaga Kswadayaan Masyarakat Berbasis Warga (LKM-RW).

- b. Partisipasi masyarakat yang menjadi harapan keberlangsungan PMB-RW masih membutuhkan perhatian karena ketidakfahaman terhadap kebijakan PMB-RW menyebabkan masyarakat sebagai tujuan utama program masih terkesan kurang kompak sehingga membutuhkan banyak perhatian dan pemahaman, mengerti apa yang dimaksud dengan model Pmberdayaan Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).
- c. Komitmen yang rendah dari pelaksana yaitu dari Inovasi (PMB RW) dan model pembangunan Berbasis Rukun Warga banyak yang tidak sejalan seperti dana stimulan RW berbagai pendukung proses tidak sejalan maksimal.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini pertama kali di laksanakan di Kecamatan Tenayan Raya. Di dalam program ini terdapat tiga aspek yang menjadi indikator berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2016 Tentang PMB-RW, yaitu Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi, Perlaksanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi.

Dalam pelaksanaan suatu program, pasti ada penilaian terhadap kegiatan program tersebut. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah sudah terlaksana dengna baik atau belum pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018 dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PMB-RW ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui berbagai temuan, data yang diterima dilapangan dan olahan berbagai sumber oleh penulis tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya “sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal”. Hal ini disebabkan dua dari tiga aspek yang menjadi ukuran membuktikan hasil “belum optimal”.

Hasil observasi terhadap Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya perencanaan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan masyarakat di mulai dari Pembentukan Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM RW) di Kecamatan Tenayan Raya sudah berjalan tepat sasaran sebagaimana mestinya.

Selanjutnya aspek Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi. Dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan kepada para narasumber kunci bahwa tahap pelaksanaan atau realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi sesuai dokumen perencanaan yang ada tidak berjalan dengan baik. Hal ini meliputi Peningkatan Usaha Produktif, Pengembangan Modal Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Secara Struktural yang dirasakan masyarakat belum merata di masing - masing RW disekitar masyarakat. Kurangnya waktu pelatihan yang diberikan, lambatnya pengumpulan laporan oleh sarjana pendamping, menyebabkan program PMB RW ini tidak berjalan serta masih banyak masyarakat yang bersifat apatis dalam menanggapi program ini.

Aspek ketiga adalah Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi. Dari hasil

observasi serta wawancara yang dilakukan kepada para narasumber kunci bahwa evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Program PMB-RW secara keseluruhan “Tidak Baik atau Belum Efektif”. Hal ini di sebabkan masih banyaknya kekurangan terhadap pelaksanaan dilapangan, Belum terlaksananya program pemberdayaan ekonomi sesuai waktu yang ditetapkan dan belum sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pembahasan yang di lakukan mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Dalam menaggulangi kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.
2. Keterbatasan dana, kesempatan belum merata dalam mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan minimnya pemberdayaan ekonomi melalui sistem koperasi dan pengembangan SDM di tingkat RW atau Kelurahan

## **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Aparat pemerintah kecamatan Tenayan Raya sebaiknya lebih produktif dalam mensosialisaikan program pemberdayaan Masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW)

2. Stakeholder terkait lebih mengoptimalkan lagi pelatihan pelatihan dan pengembangan program PMB RW ini agar program yang telah di bentuk ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New jersey: Princetown University Press.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW)
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press ( Anggota IKAPI )